



LAPORAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN IV TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan manajemen risiko merupakan laporan hasil penilaian risiko di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khusunya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan IV, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan IV Tahun 2024 disusun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran terkait pengelolaan risiko pada Dinas Perikanan terima kasih.



BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko memiliki pengertian suatu proses indentifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko sendiri memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau meminimalisir efek negative terjadinya risiko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perikanan wajib dan perlu untuk melalukan menjeman risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indicator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSDUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga oragnaisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi. Sedangkan tujuan penerapan manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indicator kinerja;
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan manajemen risiko pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumberdaya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan;
- Koordinasi dan Komunikasi.

BAB.II RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV TAHUN 2024

Dalam pencapaian indicator kinerja strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 4 indikator kinerja strategis tentunya terdapat risiko strategis yang harus dikelola pada tribulan IV yaitu :

1. Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan bencana banjir, hama penyakit ikan, dan penggunaan benih kurang berkualitas, serta adanya pengaruh terhadap belum jelasnya pemberian bantuan pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan.
2. Penurunan indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan yang berdampak pada NTP sub sector perikanan yang menjadi indicator tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja operasional terdapat beberapa risiko yang sudah diidentifikasi yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya belum mampun mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
2. Tingkat penerimaan PAD sektor pelelangan ikan belum mencapai target yang ditetapkan.

Dalam pencapaian kinerja baik itu kinerja strategis maupun operasional, Dinas Perikanan telah menyusun kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada triwulan IV sebagai berikut :

KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2024

TRIBULAN IV

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Risiko Strategis :</i>					
1	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksaan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan)	Maret,Juli,September	November	Pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan dilakukan rutin setiap tribulan
2	Serangan Hama Penyakit Ikan yang masih terjadi sehingga berpengaruh terhadap usaha budidaya	Dokumen hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret,Juli,September	November	Realisasi mengalami perubahan dikarenakan ada perubahan jadwal kegiatan

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Keterbatasan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Laporan pelaksanaan hasil kegiatan pameran	Kepala Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Juli	Belum Terlaksana	Adanya perubahan anggaran sehingga kegiatan tidak dilaksanakan
<i>Risiko Operasional :</i>						
1	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Laporan dokumen evaluasi kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	November	November	
2	Tingkat penerimaan PAD sektro pelelangan ikan	Dokumen Karcis dengan data Penerimaan PAD	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	November-Desember	November-Desember	Identifikasi celah penerimaan PAD dan perbaikan Mekanisme penerapan SOP PAD

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2024

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tribulan IV telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian yang dijadwalkan terlaksana pada tribulan IV yang dapat dijelaskan melalui kertas kerja sebagaimana berikut :

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN IV

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Strategis :									
1	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB 03	Juli	Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya	Gagal Panen		Monev dan Lab.Kesehatan Keliling serta pemberian bantuan obat ikan	Juli,September	Juli	-
2	Kurangnya diversifikasi/nilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK01	Juli	Diversifikasi produk olahan perikanan masih rendah	Nilai tambah produk perikanan lamongan masih rendah		Fasilitasi pameran untuk memperluas pemasaran produk olahan perikanan	Juli	Belum dilaksanakan	Belum ada jadwal pameran olahan hasil perikanan
3	Biaya Produksi Tinggi	RSK 02	Sept	Meningkatnya komponen utama produksi perikanan (pakan,pupuk,bia ya panen)	Penurunan angka/indeks kesejahteraan pelaku usaha perikanan		Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	Juli-September	Juli-September	Telah Dilaksanakan

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam pelayanan TPI belum optimal	ROT.03.02	Oktober	Adanya penerapan SOP dalam penerimaan PAD belum optimal dilaksanakan	Penerimaan PAD belum mencapai target yang diinginkan		Trial dan eror optimalisasi penggunaan setoran PAD menggunakan transaksi elektronik	November	November	Belum optimal sosialisasi dalam penerapan pembayaran PAD pelelangan ikan
2	Risiko Pemangku Kepentingan Penyediaan Kebutuhan sarana Prasarana Usaha belum mampu mendukung peningkatan indeks harga	ROT.01.01	Oktober	Peningkatan biaya produksi	Indeks harga yang diterima belum memenuhi target		Evaluasi prioritas intervensi dalam menekan biaya operasional yang berpengaruh signifikan	Oktober	Oktober	

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan yang terjadi diantaranya bahwa perencanaan yang telah dibuat kadang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal Dinas.

D. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada triwulan IV sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target rencana pelaksanaan namun belum dapat memberikan sisa resiko berupa ketidaktercapaian produksi perikanan budidaya.

E. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada triwulan IV sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

